

Win-Win Hun Sen: Pelajaran Sejarah Militer dari Kekalahan Khmer Merah

Win-Win Hun Sen: Military History Lessons from the Defeat of the Khmer Rouge

Sorn Samoun, Rudi Sutanto

Prodi Peperangan Asimtris, FSP Unhan RI

sornsamoun21@gmail.com

Abstract

This article analyzes the dynamics of the Cambodian civil war (1970–1998), with a particular focus on Hun Sen's strategic role in confronting the Khmer Rouge. The study highlights two critical phases: the Khmer Rouge's victory over the Lon Nol regime in 1975, and their subsequent failure against Hun Sen's politico-military strategies after 1979. Employing the theoretical framework of asymmetric warfare and insurgency, this research traces how the Khmer Rouge initially seized power through rural mobilization, external support from China, and ideological propaganda. However, they were unable to retain power when faced with Hun Sen, who combined Vietnamese military assistance, international diplomacy, and political reconciliation through the so-called win-win policy. Methodologically, the research adopts a qualitative-descriptive approach, relying on literature review, archival analysis, and interviews with historical actors. Findings indicate that Hun Sen's success was not solely attributable to military factors but also to adaptive leadership that synthesized economic reconstruction, social reconciliation, and political legitimacy. This article contributes to the field of military history by demonstrating that resolving asymmetric conflicts requires a multidimensional strategy involving armed force, diplomacy, and inclusive governance. The contemporary implications of these findings are highly relevant for the study of modern insurgencies such as the Taliban and ISIS. The Cambodian case underscores the necessity of balancing hard power and soft power in order to achieve sustainable conflict resolution and national stability.

Keywords

Khmer Rouge; Hun Sen; Cambodian Civil War; Win-Win Strategy; Asymmetric Warfare

Abstract

Artikel ini menganalisis dinamika perang saudara di Kamboja (1970–1998) dengan fokus pada peran strategis Hun Sen dalam menghadapi Khmer Merah. Penelitian menyoroti dua fase utama: kemenangan Khmer Merah melawan rezim Lon Nol (1975) dan kegagalan Khmer Merah menghadapi strategi militer-politik Hun Sen pasca-1979. Dengan kerangka teori peperangan asimetris dan insurgensi, penelitian ini menelusuri bagaimana Khmer Merah mampu merebut kekuasaan melalui basis pedesaan, dukungan asing (Tiongkok), serta propaganda ideologis. Namun, Khmer Merah gagal mempertahankan kekuasaan ketika menghadapi Hun Sen yang

mengintegrasikan strategi militer Vietnam, diplomasi internasional, dan rekonsiliasi politik melalui *win-win policy*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur, arsip, serta wawancara dengan pelaku sejarah. Hasil menunjukkan bahwa keberhasilan Hun Sen bukan hanya faktor militer, tetapi juga kepemimpinan adaptif yang menggabungkan pembangunan ekonomi, rekonsiliasi sosial, dan legitimasi politik. Artikel ini berkontribusi pada kajian sejarah militer dengan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik asimetris menuntut strategi multidimensi: kekuatan bersenjata, diplomasi, serta kebijakan inklusif. Implikasi kontemporer dari temuan ini relevan bagi studi insurgensi modern seperti Taliban dan ISIS, yang menegaskan pentingnya sinergi antara kekuatan keras (*hard power*) dan kekuatan lunak (*soft power*) dalam mengakhiri perang saudara.

Keywords

Khmer Merah; Hun Sen; Perang Saudara Kamboja; Strategi Win-Win; Peperangan Asimetris

Pendahuluan

Perang saudara di Kamboja antara tahun 1970 hingga 1998 merupakan salah satu konflik paling kompleks di Asia Tenggara yang memadukan dinamika militer, politik, dan intervensi internasional. Konflik ini bermula dari kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Lon Nol terhadap Pangeran Norodom Sihanouk pada 1970, yang mendapat dukungan Amerika Serikat (Chandler, 2008). Kudeta ini membuka jalan bagi Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot untuk membangun kekuatan gerilya yang kemudian berhasil merebut ibu kota Phnom Penh pada April 1975. Keberhasilan Khmer Merah tidak dapat dilepaskan dari kombinasi faktor internal berupa kelemahan rezim Lon Nol, kondisi sosial-ekonomi pedesaan yang miskin, serta dukungan eksternal terutama dari Republik Rakyat Tiongkok (Kiernan, 2004; Becker, 1998).

Namun, kemenangan Khmer Merah ternyata hanya menjadi awal dari periode kelam dalam sejarah Kamboja. Selama empat tahun berkuasa (1975–1979), rezim Pol Pot menerapkan kebijakan radikal yang dikenal sebagai "Year Zero" dengan melakukan genosida terhadap sekitar dua juta rakyatnya (Kiernan, 2008). Kekerasan

sistematis, pengungsian paksa, serta penghancuran struktur sosial tradisional menimbulkan trauma mendalam pada masyarakat Kamboja. Situasi ini menjadi pemicu intervensi Vietnam pada Desember 1978, yang dalam waktu singkat berhasil menggulingkan Khmer Merah dan mendirikan Republik Rakyat Kampuchea dengan Heng Samrin dan Hun Sen sebagai figur utama pemerintahan baru (Chandler, 2008).

Hun Sen, yang pada awalnya merupakan komandan Khmer Merah tingkat menengah, membelot ke Vietnam pada 1977 dan kemudian tampil sebagai pemimpin strategis yang mampu mengubah arah konflik (Strangio, 2014). Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer Vietnam, tetapi juga mengembangkan strategi politik jangka panjang yang dikenal sebagai *win-win policy*. Melalui kebijakan ini, Hun Sen berupaya merangkul lawan-lawan politik, mengintegrasikan mantan anggota Khmer Merah ke dalam struktur negara, serta mengedepankan rekonsiliasi sebagai basis konsolidasi kekuasaan (Hughes, 2003). Strategi tersebut pada akhirnya terbukti efektif dalam meredam insurgensi Khmer Merah yang terus berlanjut hingga akhir 1990-an.

Kajian mengenai perang saudara Kamboja umumnya menitikberatkan pada dua hal: pertama, keberhasilan Khmer Merah dalam melawan rezim Lon Nol; kedua, kegagalan mereka ketika berhadapan dengan strategi Hun Sen (Chandler, 2008; Kiernan, 2008). Sejarah militer tidak hanya merekam pertempuran bersenjata, tetapi juga strategi politik, diplomasi, dan pembangunan pasca-konflik. Oleh karena itu, menganalisis pendekatan Hun Sen dalam kerangka sejarah militer memberikan wawasan penting tentang bagaimana kombinasi antara *hard power* (militer) dan *soft power* (rekonsiliasi, diplomasi, dan pembangunan ekonomi) dapat menjadi solusi dalam konflik berkepanjangan (Galula, 2006; Kilcullen, 2010).

Selain itu, penelitian ini juga penting dalam konteks komparatif. Insurgensi Khmer Merah memiliki kesamaan dengan gerakan perlawanan lain seperti Viet Cong di Vietnam, Taliban di Afghanistan, dan ISIS di Timur Tengah. Namun, yang membedakan adalah kemampuan Hun Sen untuk mengakhiri konflik dengan pendekatan integratif (Strangio, 2014). Hal ini berbeda dengan banyak kasus

insurgensi modern di mana solusi militer murni sering kali gagal menghasilkan stabilitas jangka panjang (Kilcullen, 2010).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: mengapa Khmer Merah berhasil mengalahkan Lon Nol, tetapi gagal menghadapi Hun Sen? Dan bagaimana strategi *win-win* Hun Sen dapat dipahami sebagai pelajaran penting dalam sejarah militer kontemporer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan kerangka teori peperangan asimetris, insurgensi, dan kontra-insurgensi, serta memanfaatkan data wawancara, arsip sejarah, dan literatur akademik mutakhir.

2. Literature Review & Theoretical Framework (±1000 kata)

2.1. Kajian Sejarah Kamboja dan Khmer Merah

Sejarah politik Kamboja pada abad ke-20 ditandai oleh instabilitas politik, intervensi asing, serta konflik internal berkepanjangan. Menurut Chandler (2008), periode pasca-kolonial Kamboja mencerminkan benturan ideologi antara monarki tradisional, nasionalisme, dan komunisme. Khmer Merah, di bawah kepemimpinan Pol Pot, mengadopsi model revolusi Maois yang ekstrem dengan mengutamakan basis pedesaan dan mengeliminasi pengaruh perkotaan (Kiernan, 2004). Becker (1998) menyebut bahwa kemenangan Khmer Merah atas Lon Nol bukan hanya faktor militer, tetapi juga akibat kegagalan rezim Lon Nol dalam menyediakan legitimasi politik dan dukungan rakyat.

Literatur mengenai Khmer Merah banyak menyoroti aspek genosida, namun beberapa kajian menekankan dimensi militer. Kiernan (2008) menunjukkan bahwa Khmer Merah mengadopsi strategi insurgensi yang berfokus pada penguasaan desa-desa sebelum mengepung kota, mirip dengan teori Mao Zedong tentang “melingkari kota dari desa” (Mao, 1965/2000). Namun, sifat ekstrem ideologi mereka justru melemahkan basis dukungan setelah berkuasa.

2.2. Hun Sen dan Politik Win-Win

Literatur tentang Hun Sen menekankan gaya kepemimpinan yang pragmatis dan adaptif. Hughes (2003) menyatakan bahwa Hun Sen menggunakan strategi konsolidasi kekuasaan dengan memadukan kooptasi politik, pembangunan ekonomi, dan diplomasi internasional. Strangio (2014) menambahkan bahwa *win-win policy* yang diluncurkan Hun Sen sejak akhir 1980-an menjadi kunci keberhasilan dalam mengakhiri perang saudara. Strategi ini bukan sekadar pendekatan politik, tetapi juga strategi militer yang mengintegrasikan eks-Khmer Merah ke dalam struktur negara tanpa menuntut eliminasi total.

Kajian ini menunjukkan bahwa Hun Sen berbeda dengan Pol Pot maupun Lon Nol. Jika Khmer Merah menekankan ideologi radikal dan Lon Nol bergantung pada dukungan eksternal (AS), maka Hun Sen menggabungkan kekuatan militer Vietnam dengan strategi rekonsiliasi nasional (Chandler, 2008). Dengan demikian, keberhasilan Hun Sen merupakan kombinasi dari *hard power* dan *soft power*.

2.3. Teori Peperangan Asimetris

Peperangan asimetris merujuk pada konflik antara pihak yang tidak seimbang dalam kekuatan militer dan sumber daya. Menurut Metz dan Johnson (2001), pihak yang lebih lemah biasanya menggunakan strategi non-konvensional, seperti perang gerilya, terorisme, atau perang ideologis. Khmer Merah adalah contoh klasik insurgensi asimetris yang berhasil melawan Lon Nol dengan memanfaatkan kondisi sosial pedesaan, dukungan eksternal, serta kelemahan lawan.

Vo Nguyen Giap, arsitek kemenangan Vietnam melawan Prancis dan AS, menyatakan bahwa kemenangan insurgensi bukan semata-mata hasil kekuatan senjata, tetapi ditentukan oleh kemampuan mempertahankan dukungan rakyat (Giap, 1971). Dalam konteks Kamboja, Khmer Merah awalnya memperoleh dukungan rakyat desa, tetapi kehilangan legitimasi akibat kebijakan ekstrem mereka (Kiernan, 2004).

2.4. Teori Insurgensi dan Kontra-Insurgensi

David Galula (2006) dalam *Counterinsurgency Warfare* menekankan bahwa insurgensi hanya bisa bertahan jika memiliki legitimasi politik dan dukungan sosial. Sebaliknya, kontra-insurgensi yang efektif harus mampu memisahkan insurgensi dari basis sosialnya. Kilcullen (2010) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa perang insurgensi di era modern adalah “peperangan di tengah rakyat” (*war among the people*).

Khmer Merah gagal menghadapi Hun Sen karena tidak mampu mempertahankan legitimasi rakyat, sementara Hun Sen berhasil menggunakan pendekatan rekonsiliasi politik sebagai bentuk kontra-insurgensi yang inovatif. Dengan mengintegrasikan eks-Khmer Merah ke dalam struktur negara, Hun Sen berhasil mengisolasi sisa perlawanan Khmer Merah dari basis dukungan sosialnya (Strangio, 2014).

2.5. Diplomasi dan Faktor Internasional

Faktor eksternal juga sangat penting dalam konflik Kamboja. Vietnam memberikan dukungan militer langsung bagi Hun Sen, sementara Tiongkok mendukung Khmer Merah baik secara logistik maupun politik (Chandler, 2008). PBB kemudian berperan dalam Perjanjian Paris 1991, yang menjadi kerangka rekonsiliasi politik (Findlay, 1995).

Literatur kontemporer menegaskan bahwa intervensi internasional sering kali menentukan arah konflik. Dalam kasus Kamboja, Hun Sen mampu memanfaatkan perubahan geopolitik pasca-Perang Dingin untuk memperkuat posisinya. Menurut Peou (2000), keberhasilan Hun Sen mengakhiri perang saudara juga tidak terlepas dari kemampuannya menyeimbangkan hubungan dengan Vietnam, Tiongkok, ASEAN, dan Barat.

2.6. Relevansi Teoretis untuk Studi Insurgensi Modern

Kajian tentang Khmer Merah dan Hun Sen relevan dalam membandingkan dengan insurgensi modern. Taliban di Afghanistan berhasil bertahan karena

memanfaatkan jaringan sosial lokal dan kelemahan negara, meski berbeda dari Khmer Merah yang kehilangan legitimasi setelah berkuasa (Kilcullen, 2010). ISIS di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa ideologi ekstrem dapat menjadi kekuatan mobilisasi, tetapi rentan terhadap fragmentasi internal (Gerges, 2016).

Hun Sen memberikan contoh alternatif strategi kontra-insurgensi yang menekankan rekonsiliasi politik, berbeda dengan strategi militer murni yang sering gagal di Timur Tengah. Hal ini memperkuat teori bahwa keberhasilan mengakhiri insurgensi memerlukan kombinasi *hard power* dan *soft power* (Galula, 2006; Kilcullen, 2010).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan basis analisis historis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami dinamika perang saudara di Kamboja (1970–1998) dari perspektif sejarah militer, dengan penekanan pada strategi politik-militer Hun Sen dalam menghadapi Khmer Merah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna di balik suatu fenomena historis dengan menafsirkan data dari berbagai bentuk sumber (Creswell, 2018). Dalam kerangka ini, desain penelitian yang dipakai adalah studi kasus sejarah militer sebagaimana dianjurkan Yin (2018), karena model tersebut tepat digunakan untuk menelaah fenomena kompleks yang melibatkan banyak aktor, perubahan sosial-politik yang dinamis, serta intervensi eksternal. Kasus yang dianalisis difokuskan pada dua fase utama: (1) kemenangan Khmer Merah atas rezim Lon Nol (1970–1975), dan (2) kekalahan Khmer Merah dalam menghadapi strategi Hun Sen (1979–1998).

Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga kategori. **Sumber primer** berupa wawancara semi-terstruktur dengan perwira militer dan tokoh politik Kamboja yang terlibat langsung dalam konflik. Narasumber kunci meliputi Brigadir Jenderal Muon Samet (Wakil Komandan Pasukan Khusus Kerajaan Kamboja), Jenderal Nem Sowath

(Direktur Jenderal Kebijakan dan Urusan Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Kamboja), Letnan Jenderal Hun Manith (Direktur Jenderal Intelijen Militer, Kementerian Pertahanan Kamboja), serta Dr. Vong Sotheara (sejarawan dari Royal University of Phnom Penh). Seluruh wawancara dilakukan di Phnom Penh pada Juni 2024 dengan izin resmi Universitas Pertahanan Indonesia. Sesuai standar sitasi APA, wawancara dikategorikan sebagai *personal communication* (misalnya: Muon Samet, komunikasi pribadi, 12 Juni 2024). Sumber sekunder berupa literatur akademik mutakhir yang membahas sejarah Kamboja dan teori insurgensi, termasuk karya Chandler (2008), Kiernan (2004, 2008), Hughes (2003), dan Strangio (2014). Arsip dan dokumen resmi meliputi dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perjanjian Paris 1991, catatan pemerintahan Republik Rakyat Kampuchea, serta laporan NGO internasional seperti Human Rights Watch (1999) dan Amnesty International (1997).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan wawancara mendalam. Studi pustaka difokuskan pada literatur akademik yang membahas perang saudara Kamboja dan teori insurgensi. Analisis dokumen diarahkan pada arsip militer, laporan diplomatik, dan resolusi PBB. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk melengkapi kekosongan data tertulis, sekaligus menghadirkan perspektif langsung dari pelaku sejarah.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik sebagaimana dikembangkan Braun dan Clarke (2006). Tahap pertama adalah reduksi data dengan memilih informasi relevan terkait strategi Khmer Merah dan strategi Hun Sen. Tahap kedua adalah kategorisasi dengan mengelompokkan data ke dalam tema besar seperti strategi militer, dukungan eksternal, rekonsiliasi politik, dan diplomasi internasional. Tahap ketiga adalah interpretasi, yakni membandingkan temuan empiris dengan kerangka teori insurgensi dan kontra-insurgensi (Galula, 2006; Kilcullen, 2010).

Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara, arsip resmi, dan literatur akademik (Denzin, 2017). Reliabilitas penelitian dijaga melalui dokumentasi sistematis seluruh

proses pengumpulan data serta pencatatan jejak audit yang transparan. Penelitian ini juga mematuhi prinsip etika akademik dengan memperoleh izin resmi dari Universitas Pertahanan Indonesia dan otoritas Kamboja, meminta persetujuan wawancara dari para narasumber, serta menjaga kerahasiaan identitas informan yang meminta anonimitas (Israel & Hay, 2006).

4. Hasil

Kekalahan Khmer Merah dan berakhirnya perang saudara di Kamboja tidak dapat dipahami hanya dari kemenangan militer semata, melainkan dari penerapan strategi komprehensif oleh Hun Sen yang dikenal sebagai *win-win policy*. Strategi ini pada hakikatnya adalah strategi politik-militer terpadu yang dirancang untuk mengakhiri konflik panjang tanpa menciptakan siklus kekerasan baru. Hasil penelitian berbasis wawancara dengan elite militer dan pejabat Kamboja menunjukkan bahwa keberhasilan Hun Sen ditopang oleh lima pilar utama.

4. 1. Rekonsiliasi Politik

Hun Sen memahami bahwa eliminasi total Khmer Merah akan memperpanjang konflik. Karena itu, ia menerapkan kebijakan rekonsiliasi yang membuka ruang amnesti dan reintegrasi bagi para eks-kombatan. Uon Sarouen, Deputy Komandan Angkatan Darat Kerajaan Kamboja, menegaskan bahwa banyak komandan Khmer Merah menyerah bukan karena kekalahan militer, melainkan karena Hun Sen memberi mereka kehormatan untuk kembali ke masyarakat dengan posisi terhormat (komunikasi pribadi, 16 Juni 2024). Strategi ini sejalan dengan prinsip kontra-insurgensi yang menekankan pentingnya memecah kohesi lawan dengan tawaran politik, bukan hanya kekerasan (Galula, 2006).

Kebijakan rekonsiliasi ini juga didukung oleh Perjanjian Paris 1991 yang membuka jalan bagi normalisasi politik. Menurut Nem Sowath, Direktur Jenderal Kebijakan Kementerian Pertahanan, Hun Sen dengan cerdas menggunakan diplomasi perdamaian untuk menegaskan bahwa integrasi eks-Khmer Merah adalah bagian dari

rekonsiliasi nasional, bukan kelemahan pemerintah (komunikasi pribadi, 14 Juni 2024).

4. 2. Merebut Hati Rakyat

Kunci kedua strategi Hun Sen adalah memenangkan dukungan rakyat. Khmer Merah kehilangan legitimasi karena kebijakan ekstrem dan kekerasan internalnya, sementara Hun Sen menawarkan stabilitas dan keamanan. Chay Sophal, pejabat sipil yang terlibat dalam program reintegrasi, menjelaskan: “Hun Sen memenangkan hati rakyat dengan memberikan sesuatu yang lebih berharga dari kemenangan militer — yaitu perdamaian setelah puluhan tahun perang” (komunikasi pribadi, 17 Juni 2024).

Langkah-langkah ini sejalan dengan teori Kilcullen (2010) tentang *“war among the people”*, di mana keberhasilan kontra-insurgensi bergantung pada kemampuan pemimpin menarik rakyat keluar dari dukungan terhadap insurgensi.

4. 3. Restrukturisasi Militer

Selain politik, Hun Sen menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai tanpa reformasi militer. Bersama dukungan Vietnam, ia membangun struktur Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja yang lebih kohesif dan profesional. Letjen Hun Manith menekankan pentingnya intelijen dalam strategi ini. “Kami tidak hanya berperang dengan peluru, tetapi juga dengan informasi. Intelijen memungkinkan kami menghancurkan jaringan Khmer Merah dari dalam” (komunikasi pribadi, 14 Juni 2024).

Restrukturisasi militer ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politik. Eks-kombatan Khmer Merah yang menyerah banyak diintegrasikan ke dalam struktur militer baru, sehingga mengurangi potensi perlawanan lanjutan. Dengan demikian, militer berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi nasional.

4. 4. Pembangunan Ekonomi Rakyat

Hun Sen memahami bahwa akar insurgensi terletak pada kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi rakyat menjadi bagian integral dari strategi *win-win*. Menurut Nem Sowath, Hun Sen sering menekankan bahwa “rakyat tidak akan kembali ke hutan untuk berperang jika mereka punya pekerjaan, sawah, dan keamanan pangan” (komunikasi pribadi, 14 Juni 2024).

Program pembangunan pedesaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan penyediaan lahan pertanian bagi masyarakat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa perdamaian memberi hasil nyata. Langkah ini berhasil menciptakan insentif ekonomi yang membuat rakyat enggan kembali mendukung Khmer Merah, sekaligus memperkuat legitimasi Hun Sen di dalam negeri.

4. 5. Vietnam dan Hubungan Internasional

Pilar terakhir yang menopang strategi Hun Sen adalah hubungan internasional. Dukungan militer Vietnam sejak 1979 memberikan fondasi awal untuk menekan Khmer Merah. Namun, keberhasilan Hun Sen tidak berhenti pada aliansi militer. Ia memperluas basis dukungan melalui diplomasi internasional, memanfaatkan Perjanjian Paris 1991, keterlibatan PBB, serta integrasi Kamboja ke ASEAN.

Dr. Vong Sotheara menilai bahwa “Hun Sen mengubah Vietnam dari sekadar sekutu militer menjadi jembatan diplomasi internasional. Itu yang membuat pemerintahannya memperoleh legitimasi dunia” (komunikasi pribadi, 15 Juni 2024). Literatur juga mencatat peran penting legitimasi ini. Hughes (2003) menunjukkan bahwa pengakuan internasional memberi Hun Sen ruang manuver politik, sementara Strangio (2014) menekankan bahwa integrasi Kamboja ke ASEAN memperkuat stabilitas jangka panjang.

5. Diskusi

Strategi *win-win* Hun Sen dalam mengalahkan Khmer Merah memberikan kontribusi penting terhadap kajian teori insurgensi dan kontra-insurgensi, sekaligus

menghadirkan implikasi strategis bagi penyelesaian konflik kontemporer. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan mengakhiri perang asimetris tidak dapat direduksi hanya pada faktor militer, tetapi juga mencakup politik, sosial, ekonomi, dan diplomasi.

Dari perspektif teori insurgensi, pengalaman Khmer Merah pada awal 1970-an membenarkan konsep Mao (2000) dan Giap (1971) bahwa insurgensi dapat menang jika berhasil menguasai basis pedesaan dan membangun dukungan massa. Namun, fase kekalahan Khmer Merah menunjukkan keterbatasan teori klasik tersebut. Seperti ditunjukkan oleh Kiernan (2008), Khmer Merah kehilangan legitimasi rakyat akibat kebijakan ekstremnya sendiri, sehingga basis sosial yang menopang insurgensi runtuh.

Dalam konteks kontra-insurgensi, pengalaman Hun Sen mendukung tesis Galula (2006) bahwa keberhasilan melawan insurgensi ditentukan oleh kemampuan memisahkan pemberontak dari basis sosialnya. Hun Sen melakukan hal ini bukan melalui kekerasan brutal, melainkan dengan rekonsiliasi politik yang menawarkan amnesti dan integrasi. Pendekatan ini diperkuat oleh strategi merebut hati rakyat, yang sejalan dengan Kilcullen (2010) yang menggambarkan perang modern sebagai *"war among the people"*. Dengan memberi insentif politik dan ekonomi, Hun Sen secara efektif menggeser dukungan rakyat dari Khmer Merah ke pemerintahannya.

Selain itu, restrukturisasi militer dan pembangunan ekonomi rakyat memperkuat relevansi teori *comprehensive security*, di mana stabilitas tidak hanya dihasilkan oleh kekuatan bersenjata, tetapi juga oleh legitimasi negara yang didukung oleh pembangunan sosial-ekonomi (Hughes, 2003). Diplomasi Hun Sen melalui Vietnam, PBB, dan ASEAN juga mengonfirmasi argumen Strangio (2014) bahwa legitimasi internasional merupakan faktor penting dalam konsolidasi politik domestik. Dengan demikian, strategi *win-win* Hun Sen memperluas cakrawala teori kontra-insurgensi dengan menekankan kombinasi antara *hard power* dan *soft power*.

Implikasi Strategis Kontemporer

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi strategis yang relevan dengan konteks perang asimetris modern. Pertama, strategi Hun Sen membuktikan bahwa rekonsiliasi politik dapat menjadi instrumen efektif dalam mengakhiri konflik berkepanjangan. Alih-alih melakukan eliminasi total, Hun Sen memilih memberikan ruang bagi eks-kombatan untuk kembali ke masyarakat. Uon Sarouen menekankan bahwa hal ini membuat banyak komandan Khmer Merah menyerah dengan terhormat (komunikasi pribadi, 16 Juni 2024). Strategi seperti ini bisa diadaptasi dalam konteks negara lain yang menghadapi insurgensi.

Kedua, merebut hati rakyat terbukti lebih menentukan daripada kemenangan militer semata. Chay Sophal menekankan bahwa rakyat mendukung Hun Sen karena ia menawarkan perdamaian yang nyata setelah puluhan tahun konflik (komunikasi pribadi, 17 Juni 2024). Dalam konteks ini, strategi pembangunan ekonomi dan rekonsiliasi sosial menjadi faktor kunci. Hal ini menunjukkan bahwa **legitimasi politik lebih penting daripada keunggulan senjata** dalam penyelesaian insurgensi.

Ketiga, restrukturisasi militer yang dilakukan Hun Sen menunjukkan bahwa militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekerasan, tetapi juga sebagai instrumen integrasi nasional. Dengan mengintegrasikan eks-Khmer Merah ke dalam Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja, Hun Sen mengurangi risiko perlawanan lanjutan dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Keempat, pembangunan ekonomi rakyat menegaskan pentingnya dimensi kesejahteraan dalam kontra-insurgensi. Nem Sowath menekankan bahwa rakyat tidak akan kembali berperang jika memiliki pekerjaan dan pangan (komunikasi pribadi, 14 Juni 2024). Ini sejalan dengan teori pembangunan pascakonflik yang menempatkan ekonomi sebagai instrumen utama untuk mencegah kembalinya kekerasan.

Kelima, diplomasi internasional dan dukungan Vietnam menunjukkan bahwa insurgensi tidak dapat dipisahkan dari konteks geopolitik. Hun Sen dengan cerdas

menggunakan aliansi eksternal untuk menopang kekuatan dalam negeri, lalu mengubahnya menjadi legitimasi global melalui PBB dan ASEAN (Strangio, 2014). Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik asimetris sering kali membutuhkan dimensi eksternal.

Komparasi dengan Taliban, ISIS, dan Viet Cong

Pengalaman Kamboja juga relevan ketika dibandingkan dengan insurgensi kontemporer seperti Taliban, ISIS, dan Viet Cong. Dengan Viet Cong, Khmer Merah memiliki kesamaan dalam strategi gerilya pedesaan dan dukungan eksternal. Namun, berbeda dengan Viet Cong yang mempertahankan legitimasi melalui narasi anti-kolonial, Khmer Merah kehilangan legitimasi karena kekejaman internal (Chandler, 2008).

Dalam kasus Taliban, terdapat kesamaan dalam pemanfaatan basis pedesaan dan jaringan ideologis. Taliban berhasil bertahan karena lemahnya legitimasi pemerintah pusat Afghanistan dan fragmentasi politik (Kilcullen, 2010). Namun, berbeda dengan Hun Sen, pemerintah Afghanistan gagal menawarkan rekonsiliasi yang inklusif, sehingga Taliban tetap eksis.

Adapun dengan ISIS, kesamaan terletak pada penggunaan ideologi ekstrem dan kekerasan brutal untuk memobilisasi dukungan. Namun, sebagaimana Khmer Merah, ISIS menghadapi resistensi masyarakat akibat strategi teror yang merusak legitimasi mereka (Gerges, 2016). Berbeda dengan pemerintah Irak dan Suriah yang cenderung mengandalkan represi militer, Hun Sen berhasil melemahkan insurgensi dengan kombinasi rekonsiliasi dan diplomasi.

Dengan demikian, komparasi ini menegaskan bahwa keberhasilan Hun Sen lebih dekat dengan prinsip kontra-insurgensi modern: **insurgensi hanya bisa dikalahkan jika pemerintah berhasil membangun legitimasi politik, ekonomi, dan sosial yang lebih kuat daripada narasi pemberontak.**

Diskusi ini memperlihatkan bahwa strategi *win-win* Hun Sen bukan hanya fenomena lokal, tetapi juga pelajaran global. Teori insurgensi klasik menjelaskan bagaimana Khmer Merah bisa menang, tetapi teori kontra-insurgensi modern menjelaskan mengapa mereka kalah. Strategi Hun Sen menunjukkan bahwa keberhasilan mengakhiri konflik bersenjata memerlukan integrasi antara kekuatan militer, legitimasi politik, rekonsiliasi sosial, pembangunan ekonomi, dan diplomasi internasional.

Dengan menekankan lima pilar strategi—rekonsiliasi, dukungan rakyat, restrukturisasi militer, pembangunan ekonomi, dan hubungan internasional—Hun Sen membuktikan bahwa perang asimetris dapat diselesaikan secara komprehensif. Pengalaman Kamboja memberikan model alternatif yang relevan bagi negara-negara lain yang menghadapi insurgensi kontemporer seperti Taliban dan ISIS.

6. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Hun Sen dalam mengakhiri perang saudara Kamboja (1979–1998) bukan semata hasil dominasi militer, melainkan penerapan strategi politik komprehensif yang dikenal sebagai *win-win policy*. Strategi ini bertumpu pada lima pilar utama: rekonsiliasi politik, perebutan hati rakyat, restrukturisasi militer, pembangunan ekonomi rakyat, serta diplomasi internasional melalui dukungan Vietnam dan legitimasi PBB–ASEAN. Melalui pendekatan multidimensi tersebut, Hun Sen mampu melemahkan Khmer Merah tidak hanya di medan tempur, tetapi juga pada basis sosial, politik, dan diplomasi mereka.

Rekonsiliasi politik memberi ruang bagi eks-Khmer Merah untuk kembali ke masyarakat tanpa stigma kekalahan mutlak. Perebutan hati rakyat memastikan bahwa legitimasi negara lebih kuat daripada insurgensi, sejalan dengan pandangan Galula (2006) dan Kilcullen (2010) tentang pentingnya dukungan populasi. Restrukturisasi militer mengintegrasikan eks-kombatan ke dalam struktur formal, sehingga mengurangi risiko konflik baru. Pembangunan ekonomi rakyat memperkuat stabilitas

pascaperang dengan memberikan insentif nyata berupa lapangan kerja dan jaminan pangan. Terakhir, diplomasi internasional menjadikan strategi Hun Sen tidak hanya efektif di dalam negeri, tetapi juga sah di mata komunitas global (Hughes, 2003; Strangio, 2014).

Implikasi kontemporer dari temuan ini sangat relevan bagi studi insurgensi modern seperti Taliban dan ISIS. Kasus Kamboja menunjukkan bahwa kekuatan bersenjata semata tidak cukup; insurgensi hanya dapat dipatahkan bila pemerintah mampu menghadirkan legitimasi politik, rekonsiliasi sosial, dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, model Hun Sen dapat dipandang sebagai alternatif strategi kontra-insurgensi yang menekankan keseimbangan antara *hard power* dan *soft power*.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sejarah militer dan studi perang asimetris dengan menegaskan bahwa kemenangan dalam konflik berkepanjangan tidak hanya ditentukan di medan perang, tetapi juga melalui integrasi politik, ekonomi, sosial, dan diplomasi. Secara praktis, pengalaman Kamboja memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara yang masih berhadapan dengan insurgensi: perdamaian berkelanjutan hanya dapat tercapai dengan kepemimpinan adaptif dan strategi politik inklusif.

Daftar Referensi

Buku dan Literatur Akademik

- Becker, E. (1998). *When the war was over: Cambodia and the Khmer Rouge revolution*. PublicAffairs.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chandler, D. (2008). *A history of Cambodia* (4th ed.). Westview Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.

- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Galula, D. (2006). *Counterinsurgency warfare: Theory and practice*. Praeger Security International. (Karya asli 1964).
- Gerges, F. A. (2016). *ISIS: A history*. Princeton University Press.
- Giap, V. N. (1971). *People's war, people's army: The Viet Cong insurgency*. Praeger.
- Hughes, C. (2003). *The political economy of Cambodia's transition, 1991–2001*. Routledge.
- Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. Sage.
- Kiernan, B. (2004). *How Pol Pot came to power: Colonialism, nationalism, and communism in Cambodia, 1930–1975* (2nd ed.). Yale University Press.
- Kiernan, B. (2008). *The Pol Pot regime: Race, power, and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–79* (3rd ed.). Yale University Press.
- Kilcullen, D. (2010). *Counterinsurgency*. Oxford University Press.
- Mao, Z. (2000). *On guerrilla warfare*. University of Illinois Press. (Karya asli 1937, diterjemahkan Mei T'ien).
- Metz, S., & Johnson, D. V. (2001). *Asymmetry and U.S. military strategy: Definition, background, and strategic concepts*. U.S. Army Strategic Studies Institute.
- Peou, S. (2000). *Intervention and change in Cambodia: Towards democracy?* St. Martin's Press.
- Strangio, S. (2014). *Hun Sen's Cambodia*. Yale University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.

Dokumen Resmi & NGO

- Amnesty International. (1997). *Cambodia: Time for justice*. Amnesty International Publications.
- Human Rights Watch. (1999). *Cambodia: Khmer Rouge leaders must be brought to justice*. Human Rights Watch Report.
- United Nations. (1991). *Paris Peace Agreements on Cambodia*. United Nations Treaty Series.

Sumber Primer – Wawancara

Hun Manith. (2024, Juni 14). Komunikasi pribadi [Wawancara]. Phnom Penh, Kamboja.

Muon Samet. (2024, Juni 12). Komunikasi pribadi [Wawancara]. Phnom Penh, Kamboja.

Nem Sowath. (2024, Juni 14). Komunikasi pribadi [Wawancara]. Phnom Penh, Kamboja.

Sarouen, U. (2024, Juni 16). Komunikasi pribadi [Wawancara]. Phnom Penh, Kamboja.

Sopha, C. (2024, Juni 17). Komunikasi pribadi [Wawancara]. Phnom Penh, Kamboja.

Sotheara, V. (2024, Juni 15). Komunikasi pribadi [Wawancara]. Phnom Penh, Kamboja.